

DIY KEMBALI PERPANJANG PPKM MIKRO

Masyarakat Makin Sadar Prokes

YOGYA (KR) - Pemda DIY kembali memperpanjang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Mikro hingga 14 Juni 2021. Selama PPKM Mikro berlangsung, masyarakat diimbau untuk tetap disiplin menerapkan protokol kesehatan (prokes) pencegahan Covid-19.

Regulasi PPKM Mikro ini relatif masih sama dengan sebelumnya. Diharapkan dengan disiplin masyarakat, tidak muncul kluster-kluster baru lagi. "Selama daerah lain masih PPKM ya kita ikut. Kita tidak mau ambil risiko dan justru menjadi (zona) merah sendiri dan semakin tidak terkontrol. Padahal daerah lain sudah (zona) hijau. Selama lingkungan belum stabil, PPKM Mikro tetap kita berlakukan," kata Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X di Gedung DPRD DIY, Rabu (2/6).

Saat ini DIY juga masih mempertahankan status tanggap darurat Covid-19. Hal itu karena dalam penanganan Covid-19 dimungkinkan dapat lebih cepat, terutama dalam hal pendanaan. "Saya kira upaya Pemerintah sudah maksimal. Sekarang tergantung bagaimana masyarakat menjaga diri mereka sendiri. Karena PPKM Mikro ini basisnya sudah RT/RW namun masih saja muncul kluster," ungkap Sultan.

Sekda DIY Kadarmanta Baskara Aji

menyatakan, secara garis besar tidak ada perubahan PPKM sekarang dan sebelumnya. Bagi masyarakat yang dinyatakan positif dan bergejala dapat mendapatkan perawatan di rumah sakit. Sedangkan yang tanpa gejala isolasi di shelter. "Sudah ada koordinasi dari Pemkab/Pemkot termasuk dengan OPD terkait untuk memenuhi yang sedang isolasi di shelter. Anggaran sudah ada, jika kurang dapat diambilkan dari dana cadangan yang memang sudah dianggarkan," terang Aji.

Di Kepatihan, Ketua Gugus Tugas Penanganan Covid-19 DIY Paku Alam X menyatakan, kesadaran masyarakat untuk menerapkan prokes semakin membaik. Hal itu bisa dilihat dari penambahan kasus positif saat Hari Raya Idul Fitri tahun ini dengan tahun sebelumnya. Meski sempat ditemukan adanya kluster baru, tapi jumlah penambahan kasus cenderung menurun.

"Dibandingkan Lebaran sebelumnya, jumlah kasusnya menurun. Walaupun begitu masyarakat harus

menegakkan prokes secara disiplin. Karena adanya kasus atau kluster baru itu juga menunjukkan masih adanya masyarakat yang lengah untuk menerapkan prokes, padahal itu menjadi kunci untuk memutus rantai penularan Covid-19," kata Paku Alam X.

Juru Bicara Pemerintah untuk Covid-19 Reisa Broto Asmoro menyampaikan, sudah lebih dari satu tahun masyarakat menjalankan prokes selama pandemi. Harapannya, masyarakat sudah lebih memahami pentingnya prokes sebagai cara agar tidak menambah kasus Covid-19.

"Mungkin masyarakat mulai jenuh dengan terus-menerus mendisiplinkan diri menjalankan prokes ini. Namun untuk bisa terbiasa dengan hal baru, memang butuh proses. Memang harus terus-menerus diingatkan untuk disiplin menjaga prokes," tandas Reisa.

Reisa pun berpesan agar masyarakat tidak menyalahkan kesempatan untuk divaksinasi. "Kalau masyarakat sudah berkesempatan untuk divaksinasi, manfaatkanlah vaksin tersebut jangan ditunda dan jangan ragu karena berita yang belum pasti kebenarannya," ujarnya.

(Awh/Bro/Ria/Ira/San/Ati)-f



KR-Jarot Sarwosambodo

TETAP BERPRODUKSI: Bambang Agung, pemilik rumah produksi *Flame Custom Leather* di Kutoarjo, Purworejo, Jawa Tengah, membuat sepatu 'custom' pesanan konsumen yang mendesain dan memilih sendiri bahan baku sesuai keinginan mereka, Rabu (2/6). Pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah ini tetap memproduksi sepatu berkualitas berharga murah Rp 300.000 hingga Rp 400.000, meski omzetnya turun hingga 2/3 dari kondisi normal akibat pandemi Covid-19.

Yogya

"Ya sudah, dekat Malioboro nyatakan saja premium. Parkir *neng* Malioboro, *larang*. Makin jauh parkirnya dari Malioboro, mu-

Sumbangan hal 1

rah. Tapi keputusan itu harus ada dan jelas agar tidak disalahgunakan. Itu saja," ungkapnya. (Awh/Jon)-f

'Kembara

Adapun beberapa hal yang berkaitan dengan tradisi dan sosial budaya yang ikut mengisi sudut pameran yakni upacara tradisi anak-anak dalam konsep daur hidup dan juga upacara tetesan bagi anak perempuan.

Selain pameran tematik, Setyawan juga mengatakan, meski masih ada pandemi

Sumbangan hal 1

Covid-19, pihaknya menggelar kegiatan seni wayang kulit dan kesenian kerakyatan dengan pembatasan 25 persen penonton dan protokol kesehatan pencegahan Covid-19 secara ketat. Acara berlangsung setiap Selasa-Minggu malam di Pendapa Timur Museum Sonobudoyo. (R-1)-d

Alutsista

la hanya menjelaskan terkait rencana pinjaman luar negeri yang akan diatur dalam Perpres Alpalhankam sedang dibahas dan direncanakan. Sebelumnya, Komisi I DPR menggelar Raker bersama Menhan Prabowo Subianto dan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto.

Dalam rancangan Perpres Alpalhankam yang beredar, disebutkan dalam Pasal 2 ayat (1) disebutkan menteri menyusun perencanaan kebutuhan (Renbut) Alpalhankam Kemhan dan TNI untuk 5 Renstra Tahun 2020-2044 yang pelaksanaannya dimulai pada Renstra 2020-2024 dan membutuhkan Renstra Jamak dalam pembiayaan dan pengadaannya.

Dalam Pasal 3 ayat 1 disebutkan, Renbut Alpalhankam Kemhan/TNI seperti yang diatur dalam Pasal 2 ayat 1 sejumlah

Sumbangan hal 1

124.995.000.000 dolar AS. Rincian dari anggaran tersebut dijelaskan dalam Pasal 3 ayat 2 yaitu untuk akuisisi Alpalhankam sebesar 79.099.625.314 dolar AS, untuk pembayaran bunga tetap selama 5 Renstra sebesar 13.390.000.000 dolar AS dan untuk dana kontijensi serta pemeliharaan dan perawatan Alpalhankam sebesar 32.505.274.686 dolar AS.

Pasal 3 ayat 3 dijelaskan, dari kebutuhan anggaran senilai 124.995.000.000 dolar AS, telah teralokasi sejumlah 20.747.882.720 dolar AS pada Daftar Rencana Pinjaman Luar Negeri Jangka Menengah Khusus Tahun 2020-2024.

Pasal 3 ayat 4 dijelaskan selisih dari Renbut sejumlah 104.247.117.280 dolar AS yang akan dipenuhi pada Renstra Tahun 2020-2024. (Ant)-d

Inggris

dan mengembangkan produksi minyak kelapa sawit berkelanjutan. Upaya ini dilakukan dengan memperkuat kapasitas pengusaha kecil dan memperbagus penerimaan produk minyak sawit Indonesia di dunia internasional.

Pada 15 April 2021, juga telah dilaksanakan COP26 FACT Dialogue Ministerial Roundtable yang dipimpin oleh Lord Zach Goldsmith (Co-chair Inggris) dan Wakil Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Alue Dohong (Co-chair Indonesia). Dalam pertemuan itu, Indonesia dan Inggris mendorong finalisasi Joint Statement on the Principles for Collaboration yang berisikan prinsip-prinsip kerja sama dan kolaborasi pada tingkat tinggi serta komitmen untuk bekerja sama mengembangkan peta rencana aksi kolektif terkait perlindungan hutan, promosi perdagangan, dan pembangunan melalui 4 tema Working Group (WG), yaitu (1) WG Trade and

Sumbangan hal 1

Markets Development, (2) WG Smallholder Support, (3) WG Traceability and Transparency dan (4) WG Research, Innovation and Technology.

Saat ini tercatat ada 21 negara yang sudah endorse draft Joint

Statement tersebut, yakni Belgia, Brazil, Kolombia, Denmark, Perancis, Gabon, Ghana, Jepang, Korea, Liberia, Malaysia, Belanda, Nigeria, Norwegia, Paraguay, Peru, Spanyol, Britania Raya dan Uruguay. (Lmg)-f



Prakiraan Cuaca Kamis, 3 Juni 2021

Lokasi	Pagi	Siang	Malam	Diri Hari	Suhu °C	Kelembaban
Bantul					24-31	60-95
Slernan					23-31	65-95
Wates					24-31	60-95
Wonosari					23-31	65-95
Yogyakarta					23-31	65-95

KPK Segera Panggil Azis Syamsuddin

JAKARTA (KR) - Pemanggilan terhadap Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin untuk diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan suap yang menjerat mantan Penyidik KPK Stepanus Robin Pattuju (SRP), akan segera dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sebelumnya Azis tidak menghadiri panggilan KPK pada Jumat (7/5).

"Karena itu pemanggilan terhadap saksi Azis Syamsuddin akan segera dilakukan. Mengenai waktunya nanti kami pastikan dan akan kami informasikan," kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri di Jakarta, Rabu (2/6).

Pada Jumat (7/5), Azis tidak menghadiri panggilan KPK. Saat itu, yang bersangkutan mengkonfirmasi tidak dapat hadir karena sedang ada kegiatan lain. Meski demikian, Azis telah diperiksa Dewan Pengawas (Dewas) KPK terkait pelanggaran etik yang dilakukan Stepanus.

KPK telah menetapkan Stepanus

bersama Walikota Tanjungbalai M Syahril (MS) dan Maskur Husain (MH) selaku pengacara sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait penanganan perkara Walikota Tanjungbalai tahun 2020-2021. Dalam konstruksi perkara disebut pada Oktober 2020, Syahril menemui Azis di rumah dinas Azis di Jakarta Selatan.

Dalam pertemuan itu Syahril menyampaikan permasalahan adanya penyelidikan oleh KPK di Pemkot Tanjungbalai, Sumatera Utara. Terkait hal itu, Azis langsung memperkenalkan Syahril dengan Stepanus.

Diungkapkan KPK, dalam pertemuan tersebut, Syahril menyampaikan dugaan korupsi di Pemkot Tanjungbalai oleh KPK dan meminta agar Stepanus dapat membantu agar penyelidikan tersebut tidak ditindaklanjuti oleh KPK. Stepanus bersama Maskur sepakat

membuat komitmen dengan Syahril dengan menyiapkan uang Rp 1,5 miliar. Syahril menyetujui permintaan Stepanus dan Maskur tersebut.

Terhadap kasus ini, Dewas KPK pada Senin (31/5) telah membacakan putusan terkait pelanggaran etik Stepanus. Hasilnya, Stepanus diberhentikan tidak dengan hormat. Ali Fikri menegaskan, sebagai bentuk komitmen KPK atas prinsip *zero tolerance* terhadap insan KPK yang diduga melakukan pelanggaran etik, maka di samping dilakukan sidang etik terhadap Stepanus, proses hukum dugaan pidananya tetap berlanjut diselesaikan oleh KPK.

Menurut Ali, penyidik masih mengumpulkan bukti-bukti dan mengembangkan lebih lanjut informasi dan fakta yang telah diperoleh dari hasil penyidikan termasuk tentu juga informasi dan data dari hasil pemeriksaan Majelis Etik.

(Ful)-d

Pertumbuhan

akibat Covid-19 meningkat. Sri Mulyani berharap kuartal III dan kuartal IV akan terakselerasi. Tentu saja proyeksi ini memberi harapan mulai terjadinya kebangkitan dan pemulihan ekonomi di masa pandemi Covid-19. Pertanyaan penting (sekali)gus merupakan harapan yang perlu diajukan adalah apakah pertumbuhan ekonomi yang tinggi secara kuantitas tersebut juga berkualitas?

Pertumbuhan ekonomi yang berkualitas mempunyai sejumlah indikator. Namun yang utama khususnya di masa pandemi Covid-19 ini adalah sejauhmana pertumbuhan tersebut dapat membuka kesempatan kerja baru yang maksimal? Tentu termasuk penyerapan kembali pekerja yang dirumahkan atau terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) selama pandemi Covid-19 ini. Sehingga mampu mengurangi pengangguran dan kemiskinan secara signifikan. Sebab kita menyaksikan pandemi Covid-19 mengakibatkan banyak usaha yang kolaps, lalu menimbulkan PHK dan pengangguran yang tinggi. Selanjutnya menambah angka kemiskinan. Tentu ini merupakan masalah sosial ekonomi yang urgen diselesaikan.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat jumlah pengangguran Februari 2021 sebanyak 8,75 juta orang. Bila dibanding-

kan Februari 2020 (catatan: belum ada pandemi) sebanyak 6,93 juta, maka ada peningkatan sebanyak 1,82 juta orang. Karena itu jika pertumbuhan ekonomi 7,1% - 8,3% nantinya tidak berdampak positif secara signifikan dalam mengatasi masalah kesempatan kerja (pengangguran dan kemiskinan), maka bisa dikatakan pertumbuhan ekonomi tersebut tidak berkualitas. Atau terjadi apa yang disebut *paradox of growth* (paradoks pertumbuhan).

Idealnya, menurut standar International Labour Organization (ILO) setiap 1% pertumbuhan ekonomi bisa menyerap 350.000 - 400.000 tenaga kerja. Kalau ini terjadi maka tentu pengangguran akan berkurang signifikan dan daya beli masyarakat meningkat atau kemiskinan berkurang.

Jika kita melihat di lapangan, salah satu sektor yang paling terdampak di masa pandemi ini adalah sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Menurut data yang disampaikan Ketua Umum Asosiasi UMKM (Akumindo) M lkhans, sepanjang masa pandemi Covid-19 berlangsung, sektor UMKM rontok hingga 50%, dari 64,7 juta unit (2019) menjadi 34 juta unit (2020). Merosotnya jumlah UMKM ini otomatis berkontribusi menurunkan Pendapatan Domestik

Bruto (PDB) Indonesia (KR,27/3).

Sebagaimana kita ketahui bahwa UMKM merupakan salah satu kunci pertumbuhan ekonomi Indonesia. Menurut data BPS jumlah UMKM di Indonesia mencapai 99,9% dari keseluruhan usaha. Berkontribusi 60% lebih pada PDB nasional, serta lebih 90% tenaga kerja diserap oleh UMKM dari daya serap tenaga kerja dunia usaha. Dengan data tersebut jika kita ingin pertumbuhan ekonomi yang ada saat ini berkualitas, harus mampu memulihkan dan atau menjadikan UMKM sebagai salah satu bagian/subjek penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi.

Karena itu untuk melihat indikator pertumbuhan ekonomi yang berkualitas di masa pandemi Covid-19 ini salah satunya adalah dengan melihat seberapa besar jumlah UMKM yang kembali bangkit dan berjalan normal. Bila sebagian besar UMKM sudah mulai bangkit kembali dan berjalan normal bahkan bisa tumbuh, sesungguhnya masalah pengangguran dan kemiskinan sudah sebagian besar terselesaikan. Dengan begitu pertumbuhan ekonomi yang ada bisa dikatakan berkualitas.

(Penulis adalah Dosen FEB Universitas Ahmad Dahlan, Pengurus ISEI Cabang Yogyakarta 2020-2023)-f

Sumbangan hal 1



Ismadyanti Purwaning Astuti, S.E., M.Sc
Dosen Program Studi Ekonomi

Akselerasi Inklusi Keuangan di Masa Pandemi Covid-19



KONDISI pandemi Covid-19 berdampak pada penurunan tingkat pendapatan baik di tingkat rumah tangga, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) maupun perusahaan. Jumlah angka positif covid yang merangkak naik mengharuskan pemerintah membuat kebijakan pembatasan sosial baik tingkat nasional maupun lokal. Kebijakan tersebut berdampak pada beberapa UMKM maupun perusahaan yang menurun omset pendapatannya

sehingga harus mem-PHK karyawannya. Hal tersebut juga berpengaruh pada kondisi keuangan rumah tangga yang menurun karena tulang punggung keluarga harus dirumahkan. Kondisi ekonomi Indonesia mengalami penurunan di masa pandemi, terlihat dari pertumbuhan ekonomi masih dalam kondisi resesi yaitu pada triwulan IV 2020 sebesar -2,19%. Pemerintah telah melakukan banyak stimulus-stimulus kebijakan untuk meningkatkan konsumsi sehingga pertumbuhan ekonomi menuju ke angka yang positif. Salah satu kebijakan untuk menaikkan pertumbuhan ekonomi adalah inklusi keuangan.

Inklusi keuangan adalah kemudahan masyarakat untuk mengakses dan menggunakan layanan keuangan baik tabungan, pinjaman, asuransi dan transfer

payment. Inklusi keuangan di Indonesia terus meningkat dari sisi kepemilikan dan penggunaan rekening pada Lembaga Keuangan Formal. Hal ini dapat dilihat dari indeks kepemilikan rekening yang meningkat dari 31,3% pada 2014 menjadi 61,7% pada 2020, sedangkan indeks penggunaan rekening meningkat dari 59,74% pada 2013 menjadi 81,4%.

Efek kebijakan pemulihan ekonomi dengan menyalurkan dana bantuan pemerintah langsung kepada masyarakat melalui rekening mendorong kepemilikan dan penggunaan rekening. Kebijakan pemulihan ekonomi yaitu kemudahan penyaluran kredit kepada UMKM dan Bantuan Tunai Langsung (BLT) kepada masyarakat berpengaruh di bawah Rp. 5.000.000,00 maupun kepada UMKM. Kebijakan tersebut

sebagai cara pemerintah untuk meningkatkan konsumsi masyarakat dan menjaga perekonomian dalam kondisi yang baik sehingga diharapkan berpengaruh pada peningkatan pertumbuhan ekonomi.

Ada dua strategi utama yang digunakan dalam akselerasi inklusi keuangan yaitu kredit baik bagi usaha mikro maupun usaha besar dan meningkatkan layanan keuangan berbasis digital. Kemudahan dalam memperoleh kredit baik dalam pengajuan dan jaminan kredit bagi pengusaha sangat penting dilakukan. Dengan memperoleh kredit, usaha baik mikro maupun besar dapat mempertahankan usahanya dikarenakan omset yang menurun di masa pandemi dan menghindari terjadinya PHK yang berdampak pada peningkatan pengangguran. Perkembangan inklusi

keuangan tidak terlepas pada layanan keuangan berbasis digital. Layanan keuangan digital yang telah diterapkan yaitu mobile banking dan Quick Response Code Indonesia Standard (QRIS) sebagai program untuk mencegah penularan Covid-19 dan meningkatkan aktifitas ekonomi. Mobile banking merupakan sebuah layanan yang disediakan bank untuk melakukan transaksi perbankan melalui smartphone. Saat ini, mobile banking mempunyai berbagai macam fitur yang mempermudah pengguna dalam menggunakan layanan keuangan khususnya transfer payment.

Pembayaran online yang sekarang banyak berkembang seperti ovo, gopay dan lainnya mendorong Bank Indonesia untuk mengembangkan pembayaran bersama yang disebut QRIS. QRIS

dikembangkan oleh industry sistem pembayaran bersama dengan Bank Indonesia agar proses transaksi dapat lebih mudah, cepat dan aman. Penyelenggara aplikasi QRIS dilakukan oleh bank dan nonbank yang dapat digunakan oleh seluruh masyarakat dan dapat juga digunakan oleh seluruh toko, pedagang, warung, parkir, tiket wisata dan donasi berlogo QRIS, meskipun penyedia QRIS di merchant berbeda dengan yang digunakan masyarakat.

Dengan kemudahan pembayaran dengan barcode ini diharapkan dapat mengurangi interaksi secara langsung dan menumbuhkan gairah konsumsi dari masyarakat sehingga harapannya pertumbuhan ekonomi mengalami peningkatan ke arah yang positif. (*)